

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini mengungkap bahwa eksklusi prinsip inklusivitas SDGs poin 16 yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam *Singapore Green Plan 2030* bukanlah kelalaian, melainkan hasil dari strategi *norm localization* yang disengaja oleh rezim otoritarianisme ekologis. Melalui proses adaptasi selektif, yaitu *framing* isu lingkungan sebagai tantangan teknokratis, *grafting* target teknis SDGs yang selaras dengan agenda domestik, dan *pruning* prinsip demokratis yang dianggap mengganggu stabilitas, pada akhirnya Singapura berhasil mempertahankan kontrol negara atas kebijakan lingkungan sambil mencapai target iklim yang ambisius.

Namun, legitimasi internasional Singapura sebagai "pemimpin hijau" bertolak belakang dengan praktik domestik yang membatasi ruang sipil. Hal ini memantik debat tentang kompatibilitas antara otoritarianisme dan keadilan lingkungan, terutama ketika kebijakan iklim justru memperkuat ketimpangan kekuasaan. Singapura membuktikan bahwa target SDGs bisa dicapai tanpa prinsip inklusivitas, tetapi model ini berisiko melanggengkan ketidakadilan.

Keberhasilan ini menimbulkan pertanyaan reflektif terkait bagaimana seharusnya tata kelola lingkungan dipraktikkan? Apakah model otoritarianisme ekologis yang mengorbankan partisipasi publik bisa dijustifikasi demi efisiensi? Jika model otoritarianisme ekologis Singapura berhasil mencapai target hijau tanpa inklusivitas, apakah asumsi bahwa demokrasi adalah prasyarat mutlak untuk keberlanjutan yang termuat dalam prinsip SDGs 16 masih relevan?

Temuan ini berkontribusi pada diskusi teoritis tentang varian otoritarianisme dalam isu lingkungan, khususnya bagaimana rezim otoriter mengadaptasi wacana global untuk mempertahankan legitimasi domestik tanpa mengakomodasi prinsip demokratis. Temuan ini memperkuat pernyataan bahwa negara otoriter dapat mengadopsi agenda hijau tanpa

demokratisasi, dengan memanfaatkan proses lokalisasi norma yang selektif dan adaptif untuk mempertahankan kontrol politik.

Penelitian ini bukan akhir, melainkan awal dari debat kritis tentang masa depan SDGs di tengah gelombang otoritarianisme hijau. Jika Singapura bisa sukses "menghijaukan" dirinya tanpa melibatkan prinsip inklusif, apakah inilah saatnya untuk memperjuangkan *sustainability* yang tidak hanya bersih lingkungan, tetapi juga adil secara politik?. Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan perlunya redefinisi "keberhasilan" keberlanjutan yang tidak hanya mengukur capaian teknis, tetapi juga proses demokratis yang melingkupinya.

